

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penerapan akuntansi yang baik oleh instansi pemerintah dan pengawasan yang optimal terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah diharapkan akan dapat memperbaiki akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga kinerja penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan dapat optimal. Perbaikan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diharapkan akan berimplikasi pada minimalnya praktik korupsi sehingga diharapkan good governance dapat diwujudkan oleh Pemerintah Indonesia baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lain juga berdampak luas pada bidang ekonomi dan politik (Agus Dwiyanto, 2002).

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan standar atau panduan untuk menyajikan informasi keuangan yang berkualitas sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam melakukan pengelolaan keuangan negara. Menurut Anis Chairil, Imam Ghozali, (2003), ada beberapa alasan yang menyebabkan penentuan standar akuntansi memiliki peranan penting dalam penyajian laporan keuangan. Salah satu alasan tersebut adalah memberikan informasi akuntansi kepada pemakai tentang posisi keuangan, hasil usaha, dan informasi tersebut diasumsikan jelas, konsisten, dan dapat dipercaya. Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan landasan bagi pemerintah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah.

Hal ini dijelaskan dalam PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan adanya dasar peraturan tentang standar akuntansi pemerintahan, pemerintah dituntut untuk dapat menerapkan dan mengaplikasikan standar akuntansi pemerintahan sebagai landasan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang baik dan berkualitas dalam rangka menciptakan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik.

Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintah bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhan informasi keuangan secara umum yang lebih berkualitas bagi para pengguna laporan keuangan dalam rangka menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Bagi para pengawas keuangan negara, laporan keuangan yang berbasis standar akuntansi memberikan tantangan baru dalam peningkatan aspek pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Tantangan tersebut adalah kemampuan pihak pengawas dalam mengungkap kewajaran penyajian laporan keuangan melalui opini yang diberikannya. Kemampuan ini tentunya diharapkan memperbaiki pengelolaan keuangan negara. Dalam bidang ekonomi, perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan mendorong perbaikan iklim investasi, sedangkan dalam bidang politik, perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah memperbaiki tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Mardiasmo (2009 : 20) mengatakan, akuntabilitas publik adalah kewajiban seorang pemegang amanah untuk

memberikan informasi, pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Sejalan dengan semangat akuntabilitas dan tranparansi dalam rangka reformasi pengelolaan keuangan pemerintah, dorongan terhadap kebutuhan akan pengukuran kinerja pemerintah juga meningkat. Pengukuran kinerja ini diperlukan sebagai informasi mengenai manfaat yang diberikan dari jasa pelayanan publik yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Kinerja secara umum dapat didefinisikan sebagai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program untuk mencapai suatu sasaran, tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan oleh organisasi. Untuk mengukur kinerja harus ditentukan terlebih dahulu kriteria keberhasilan yang berupa tujuan atau target yang hendak dicapai, dan dituangkan dalam perencanaan kinerja.

Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dijelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi karakteristik: Relevan, Andal, Dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Sebagai tindak lanjut dari format laporan keuangan yang baru, pemerintah kemudian mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi keuangan pemerintah. Standar ini merupakan pedoman bagi pemerintah dalam menyajikan

laporan keuangan yang standar, termasuk didalamnya tentang perlakuan akuntansi, pengakuan akuntansi, serta kebijakan akuntansi. Standar akuntansi diperlukan agar laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah dapat diperbandingkan, dan adanya kesamaan persepsi dan pemahaman antara penyaji laporan keuangan, pengguna laporan keuangan maupun pengawas laporan keuangan.

Penerapan akuntansi yang baik oleh instansi pemerintah akan menghasilkan laporan keuangan instansi pemerintah yang baik. Pengawasan yang optimal terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah akan menjamin bahwa laporan keuangan tersebut disajikan secara benar dan wajar sesuai standar akuntansi keuangan pemerintahan sehingga informasi yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut pengguna dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengambil keputusan.

Penelitian terdahulu yang membuktikan adanya pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Intan Permata Haska Wina dan Siti Khairani (2013) melakukan penelitian tentang pengaruh penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik dan pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas kota Palembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel penerapan standar akuntansi sektor publik, pengawasan kualitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan baik secara simultan dan parsial terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Juanita Fatmala (2014) melakukan penelitian dengan tujuan mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan Standar

Akuntansi Pemerintah daerah terhadap Akuntabilitas kinerja instansi pada SKPD Kabupaten Bengkulu Tengah secara parsial dan simultan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntansi pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penelitian lain dilakukan oleh Ariessa Permata Bowta (2014) tentang pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah daerah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo. Dodi Fs Lumentut (2014) melakukan penelitian tentang pengaruh kualitas pelaporan keuangan terhadap akuntabilitas pemerintah daerah kota Gorontalo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pada pemerintah kota Gorontalo. Dengan kata lain kualitas laporan keuangan yang semakin baik akan turut meningkatkan akuntabilitas pada pemerintah kota Gorontalo.

Mawarni berutu (2015) melakukan penelitian tentang pengaruh penerapan standar akuntansi sektor publik dan pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten Pelalawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi sektor publik dan pengawasan kualitas laporan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada SKPD Kabupaten Pelalawan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Mawarni Berutu (2015) tentang “Pengaruh penerapan standar akuntansi sektor publik dan pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten Pelalawan”. Penelitian ini bermaksud untuk menguji kembali sejauh mana pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan pengawasan kualitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Objek yang digunakan dalam penelitian ini berbeda dengan objek yang pernah diteliti sebelumnya yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Lingga provinsi Kepulauan Riau.

Kabupaten Lingga menggunakan kebijakan pelaporan keuangan untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu pemerintah daerah, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD, tidak termasuk perusahaan daerah. Tujuan kebijakan ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi. Basis akuntansi yang digunakan untuk menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Lingga adalah basis akrual, sesuai pedoman PP No 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis Akrual. Dimana basis akuntansi yang mengaku pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Lingga tahun 2015 dimaksudkan untuk menjelaskan dan memaparkan berbagai kinerja strategis yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Lingga. Indikator kinerja yang dipaparkan meliputi kinerja kegiatan yang menjadi tanggung jawab unit-unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga, serta indikator sasaran strategis dan indikator makro yang menjadi tolok ukur dan acuan bagi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lingga pada masa mendatang. Analisis kinerja Pemerintah Kabupaten Lingga pada tahun 2016 disajikan untuk setiap misi yang menjadi arah pembangunan Kabupaten Lingga sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010 – 2016.

Berdasarkan review Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) atau sekarang telah berganti nama menjadi Laporan Kinerja (LKJ) Kabupaten Lingga. Terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini yaitu sebanyak 14 indikator kinerja tidak diketahui realisasinya. Sehingga keberhasilan kinerja pemerintah Kabupaten Lingga hanya diukur atas indikator-indikator yang ada realisasi kinerjanya. (Sumber: Linggakab.go.id).

Saat ini kabupaten Lingga memperoleh opini laporan keuangan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang dikeluarkan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 2010-2014. Dan menemukan permasalahan bahwa pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lingga masih dianggap belum baik karena tidak semua laporan

keuangan PEMDA mengacu pada SAP, sehingga perlu untuk dilakukan perbaikan.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas menunjukkan kurang baiknya penerapan standar akuntansi pemerintahan dan pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi Kabupaten Lingga dan mencari indikator-indikator yang tidak diketahui realisasinya.

Bedasarkan latar belakang dan masalah di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul **“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti adalah: Apakah penerapan standar akuntansi pemerintahan dan pengawasan kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Lingga.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Lingga.

2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Lingga.

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- 1) Bagi penulis dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang akuntansi, khususnya akuntansi pemerintahan pada instansi pemerintah.
- 2) Bagi SKPD, sebagai masukan atau dasar untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah daerah, sehingga dapat mengetahui letak kelebihan dan kekurangan dari penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan.
- 3) Bagi pengembangan ilmu, sebagai bahan masukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dalam organisasi sektor publik.
- 4) Bagi peneliti selanjutnya, sebagai bahan referensi tambahan untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Sistematika Penulisan

BAB I :Merupakan bab pendahuluan yang menyajikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II :Bab ini berisikan tinjauan pustaka yang menjadi acuan pemahaman teoritis dalam penelitian ini, review penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran teoritis serta pengembangan hipotesis penelitian.

BAB III :Bab ini menjelaskan tentang metode penelitiannya, lokasi penelitian, sampel dan populasi, operasional variabel, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB IV :Dalam bab ini mengemukakan gambaran umum pemerintah kabupaten Lingga meliputi sejarah berdirinya pemerintah kabupaten Lingga, geografis, kegiatan-kegiatan setiap SKPD pemerintah kabupaten Lingga, dan struktur pemerintah kabupaten Lingga.

BAB V :Pada bab ini akan menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, menganalisis dan mengevaluasi hasil penelitian tersebut.

BAB VI :Pada bab ini penulis akan menutup dengan membuat kesimpulan dan memberikan saran-saran yang dirasakan perlu sesuai dengan hasil dari penelitian yang dilakukan.

